



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 67 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Dinas Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Dinas Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022 NOMOR 67**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 67 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN TAHUN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Rencana Strategis (Renstra). Ada beberapa hal yang harus diketahui mengenai Rencana Kerja.

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD
3. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi tahap penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
4. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember, berpedoman pada Renstra
5. Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.
6. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu.

Mengingat arti strategis Rencana Kerja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Rancana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut disusun dengan berpedoman pada landasan hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembar Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
  29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
  30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2023.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RKT dan Rencana Aksi APBD Tahun Anggaran 2023.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika naskah Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut 2023 disusun, sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2021**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut meliputi sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan mengacu pada rencana strategis. Sasaran dalam rencana kerja disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut, pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan diantaranya dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dokumen LAKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2021 pada sisi akuntabilitas keuangan, belanja daerah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut sebagai berikut :

**Tabel 2.1.1**  
**Rekapitulasi Pencapaian Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah**  
**Tahun 2021**

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase Capaian (%)
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>9,240,000,-</b>	<b>16,336,950,-</b>	<b>176,81</b>
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>13,694,230,701,-</b>	<b>12,899,337,831,-</b>	<b>94,20</b>
-	Belanja Pegawai	5,647,913,910,-	5,043,293,014,-	89,29
-	Belanja Barang dan Jasa	5,780,821,001,-	5,624,607,387,-	97,30
-	Belanja Modal	2.265,495,790,-	2.231,437,430,-	98,50

Pada Tahun Anggaran 2021, Realisasi Belanja Daerah adalah sebesar **Rp. 12.889.337.831,-** atau sebesar **94.20,- %** yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar **Rp. 5.043.293.014,-** atau sebesar **89.29,- %**, Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 5.624.607.387,-** atau sebesar **97.30,- %**, dan Belanja Modal sebesar **Rp. 2.231.437.430,-** atau sebesar **98,50 %**, Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Tahun 2021 dari jumlah Target Anggaran sebesar **Rp. 9.240.000,-** reralisasi melebihi sebesar **Rp. 16.336.950,-** atau sekitar **176.81 %**.

Dalam hal capaian kinerja sasaran program Tahun 2022 terhadap dokumen perencanaan yang ada yaitu Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2023 dan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dapat diambil kesimpulan secara umum mengenai pencapaian sasaran program/kegiatan terhadap dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menunjukkan kinerja sasaran yang cukup baik.

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan. Dalam jangka waktu yang pendek pengukuran meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*Outcome*), sedangkan untuk mengukur kinerja dalam jangka waktu yang relatif panjang dalam Rencana Kerja ini tidak dilakukan pengukuran, karena memerlukan waktu yang relatif panjang.

Pelaksanaan rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut tahun anggaran 2022 dengan capaian yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut, sebagai berikut :

Tabel 2.1.2

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2022
				Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
1	05						
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	11.290.294.126	13.694.230.701	12.899.337.831	94,20	
1	05	01					
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
		<b>Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran</b>	6.231.493.204	6.230.245.804	5.615.038.959	90,13	

1	05	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya tingkat ketepatan penyelesaian perencanaan</b>	<b>48.320.000</b>	<b>13.634.000</b>	<b>13.633.900</b>	100,00	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang selaras dengan RPJMD, RPJMP dan disusun sesuai ketentuan	25.000.000	13.634.000	13.633.900	100,00	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaianan realisasi keuangan SKPD yang disusun sesuai Ketentuan	23.320.000	-	-	-	
1	05	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan Dinas Pemadam kebakaran</b>	<b>5.656.918.604</b>	<b>5.639.363.910</b>	<b>5.036.693.014</b>	<b>89,31</b>	

1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN di Dinas Pemadam Kebakaran	5.656.918.604	5.639.363.910	5.036.693.014	89,31	
1	05	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM aparatur yang profesional</b>	<b>224.704.400</b>	<b>207.229.900</b>	<b>202.653.400</b>	<b>97,79</b>	
1	05	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	28.624.400	8.580.100	8.573.800	99,93	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya keseragaman aparatur pada Dinas pemadam kebakaran	196.080.000	198.649.800	194.079.600	97,70	
1	05	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Peningkatan pelayanan administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran</b>	<b>124.671.600</b>	<b>222.469.994</b>	<b>221.172.400</b>	<b>99,42</b>	

1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah perlengkapan listrik dan elektrikal yang dipergunakan	10.000.000	9.984.900	9.984.900	100,00	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	50.000.000	74.959.294	73.795.000	98,45	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga dengan kondisi baik	6.135.800	8.500.100	8.500.100	100,00	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang siap pergunakan	15.000.000	25.089.900	25.089.800	100,00	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran Lokal dan regional yang tersedia	8.535.800	8.535.800	8.535.800	100,00	

1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dan peserta rapat yang mendapatkan jamuan makan minum	10.000.000	20.400.000	20.400.000	100,00	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan kosnultasi yang dihadiri	25.000.000	75.000.000	74.866.800	99,82	
1	05	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik</b>	<b>3.901.600</b>	-	-	-	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya kebutuhan peralatan Rumah tangga Dinas	3.901.600	-	-	-	
1	05	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya pelayanan administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran</b>	<b>96.087.000</b>	<b>77.648.000</b>	<b>71.057.445</b>	<b>91,51</b>	

1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Telepon, Internet, Air dan Listrik	61.741.800	46.602.000	40.011.545	85,86	
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan yang mendapatkn honorarium jasa kebersihan dan pembelian perlengkapan kebersihan	10.087.000	9.170.000	9.170.000	100,00	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kerja yang mendapatkan perawatan/pemeliharaan	24.258.200	21.876.000	21.875.900	100,00	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik</b>	<b>76.890.000</b>	<b>69.900.000</b>	<b>69.828.800</b>	<b>99,90</b>	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah STNK kendaraan dinas yang di perpanjang legalitas/masa berlakunya	76.890.000	69.900.000	69.828.800	99,90	

1	05	04			<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Persentase layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten</b>	<b>5.058.800.922</b>	<b>7.463.984.897</b>	<b>7.284.298.872</b>	<b>97,59</b>	
1	05	04	2.01		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten</b>	<b>4.758.800.922</b>	<b>7.263.984.897</b>	<b>7.085.469.072</b>	<b>97,54</b>	
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RISPK (Master Plan) yang tersedia	-	49.999.900	48.794.242	97,59	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang siap siaga menangani kejadian kebakaran	3.769.770.000	3.374.874.900	3.306.774.700	97,98	

1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang Terpelihara dalam kondisi siap pakai	501.486.281	1.353.599.750	1.348.366.550	99,61
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	297.544.641	2.305.830.897	2.202.904.180	95,54
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran Yang Memiliki Kompetensi/sertifikat Pemadam Kebakaran	140.000.000	150.000.000	150.000.000	100,00
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terselenggaranya peringatan HUT damkar tingkat Nasional, Provinsi dan kabupaten	50.000.000	29.679.450	28.629.400	96,46

1	05	04	2.02		<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Terlaksananya Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran</b>	50.000.000	50.000.000	49.866.400	99,73	
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan gedung yang di periksa alat proteksi kebakaran	50.000.000	50.000.000	49.866.400	99,73	
1	05	04	2.04		<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</b>	200.000.000	100.000.000	98.963.400	98,96	
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Relawan yang terlatih dalam pencegahan dini kebakaran	100.000.000	-	-	-	

1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Relawan yang terlatih dalam pencegahan dini kebakaran	100.000.000	100.000.000	98.963.400	98,96	
1	05	04	2.05		<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>Jumlah penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,00</b>	
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang melaksanakan pelatihan Vertical Rescue	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,00	

Tabel 2.1.3

**Laporan Pelaksanaan Kegiatan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022**  
**(Pemborongan, Konsultansi, Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya)**

No	Data Umum					Sumber Dana	Pagu Anggaran DPA (Rp)	Nilai Kontrakt (Rp)	Pelaksana PT/CV	Lama Pekerjaan (HK)	Mulai (Tgl - Bulan)	Selesai (Tgl - Bulan)	Fisik (%)	Keuangan (%)
	Nama Kegiatan	Sub Kegiatan	Nama KPA	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan Kec/Desa									
1	2		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Efi Rofiansyah, S. Sos	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	DAU	109.928.800	103.301.000	CV. KARAN G SAMBUNG	7 Hari	17 Maret 2022	24 Maret 2022	100%	93,97

2	- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Efi Rofiansyah, S. Sos	Pengadaan Pakaian Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran	DAU	70.360.000	65.667.600	CV. SAMUDERA SELATAN	7 Hari	12 April 2022	25 April 2022	100%	93,33
3	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	H. Guriansyah Sukiran, ST., M.Si	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan	Dinas Pemadam Kebakaran	DAU	196.080.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>							<b>376.368.800</b>	<b>168.968.600</b>						

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pemadaman Kebakaran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Pengaturan SPM Sub Urusan Kebakaran meliputi:

1. Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
2. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
3. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
4. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran;
5. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Mutu Pelayanan Dasar meliputi:

1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;

3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran;
6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran

Dalam menentukan pencapaian pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Garut masih terkendala dikarenakan belum selesainya penyusunan Pedoman Teknis Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.

### **2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
3. Urusan Kebakaran adalah sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas Damkar dan Penyelamatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Damkar dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas Damkar dan Penyelamatan.
6. Kegiatan Teknis Operasional adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas pencegahan, pengendalian, pemadaman,

penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Urusan Kebakaran.

7. Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas investigasi kejadian kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta perbengkelan sarana prasarana pemadam kebakaran.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk:

- a. Mencapai pemenuhan layanan perlindungan masyarakat bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan melalui Perangkat Daerah Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- b. Merumuskan kelembagaan Dinas Damkar dan Penyelamatan yang memiliki standardisasi nomenklatur, fungsi dan struktur kelembagaan di provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Melakukan pembinaan umum, pembinaan teknis, dan pengawasan Dinas Damkar dan Penyelamatan.

Dalam hal ini Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut adalah tidak adanya cangkolan bagi Pemadam kebakaran untuk bisa mengajukan anggaran ke pusat dan provinsi dikarenakan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 baru ditetapkan tahun 2020 sehingga belum terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tingkat Provinsi ataupun di Pusat.

**Isu-isu Strategis** Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut:

- Kurangnya Tempat Layanan atau POS Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sehingga beberapa kejadian terlambat di tangani,
- Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran,
- Kurangnya SDM Petugas Pemadam Kebakaran,
- Belum adanya koordinasi dengan instansi berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penanganan pasca kebakaran.
- Masih kurangnya peran serta dan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran.
- Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pemadam Kebakaran.

**2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Program dan kegiatan prioritas terdiri dari 2 program, 12 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan pada rancangan awal RKPD, secara rinci disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

**Tabel 2.4.1**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
							(Permendagri 90)							
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	10 Dokumen	30.000.000			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	10 Dokumen	30.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>6.823.630.331</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	14 Bulan	6.823.630.331			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.823.630.331	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>358.514.780</b>			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	4 Unit	50.000.000			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	208 Stell	308.514.780			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	308.514.780	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>333.700.000</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>333.700.000</b>	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tarogong Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	9 Jenis	11.000.000			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarogong Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	34 Jenis	100.000.000			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tarogong Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	5 Jenis	16.500.000			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarogong Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	5 Jenis	50.000.000			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50.000.000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarogong Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	142 Eksemplar	13.200.000			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	13.200.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tarogong Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	1020 OH	33.000.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarogong Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	192 OH	100.000.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tarogong Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	10.000.000			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>4.695.000.000</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>4.695.000.000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tarogong Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	1 Unit	550.000.000		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		550.000.000	
	Pengadaan Mebel	Tarogong Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	9 Jenis	135.000.000		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		135.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarogong Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	4 Buah	10.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10.000.000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	1 Unit	4.000.000.000			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4.000.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>132.165.660</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>132.165.660</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	12 Bulan	94.600.000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	94.600.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	2 Jenis	11.095.700			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11.095.700	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	2 Jenis	26.469.960			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26.469.960	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>958.579.000</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>958.579.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	21 STNK	84.579.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	84.579.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarogong Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	2 Jenis	524.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	524.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tarogong Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	7 Bangunan Kantor	350.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	350.000.000	
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>				<b>11.768.235.847</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>							<b>11.768.235.847</b>	



	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Kesiapan Petugas dalam Penanganan Kebakaran	115 Orang	4.945.375.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.945.375.000	
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dalam kondisi siap pakai	4 Jenis	450.000.000	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	450.000.000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran	29 Jenis	4.412.860.847	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4.412.860.847	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang Berkompetensi Sertifikat Pemadam 2	50 orang	360.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	360.000.000	

	<p>Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)</p>	<p>Tarogong Kidul (Disdamkar)</p>	<p>Tersedianya sistem informasi penanganan kebakaran dan penyelamatan</p>	<p>1 paket</p>	<p>100.000.000</p>	<p>Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)</p>		<p>Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)</p>	<p>Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya</p>	<p>Dinas Pdam Kebakaran</p>	<p>Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya</p>	<p>Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi &amp; Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya</p>	<p>100.000.000</p>	
--	--	-----------------------------------	---	----------------	--------------------	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--------------------	--

	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Taroging Kidul (Disdamkar)	Terselenggaranya Peringatan HUT Damkar Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten	48%	100.000.000	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dinas Pemasdam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100.000.000	
	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>				<b>150.000.000</b>		<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>						<b>150.000.000</b>	

	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tarogong Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya jumlah gedung yang terproteksi kebakaran	100 Unit Gedung Bangunan	100.000.000			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dinas Pdam Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	100.000.000	
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tarogong Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya jumlah gedung yang terproteksi kebakaran	50 Unit Gedung	50.000.000			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dinas Pdam Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	50.000.000	
	<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>				<b>100.000.000</b>		<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>						<b>100.000.000</b>	

	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Kualitas SDM Investigator Kebakaran	5 Orang	100.000.000			Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dinas Pemasdam Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	100.000.000	
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>				<b>700.000.000</b>		<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>						<b>700.000.000</b>	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya kemampuan Masyarakat dalam pencegahan dini bahaya kebakaran	800 Orang	300.000.000			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Dinas Pemasdam Kebakaran	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	300.000.000	

	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya kemampuan Masyarakat dalam pencegahan dini bahaya kebakaran	20 Desa	300.000.000			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakarandi Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakarandi Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	300.000.000	
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya kemampuan Masyarakat dalam pencegahan dini bahaya kebakaran	100 Buah	100.000.000			Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasedamkar	100.000.000	
	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>				<b>350.000.000</b>		<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>						<b>350.000.000</b>	

	Penyelenggara n Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Tarog ng Kidul (Disda mkar)	Meningka tnya penangan an penyelam atan non kebakara n (Rescue)	6000 Orang	100.000.0 00			Penyelenggara n Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Dinas Pema dam Kebak aran	Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	100.000.00 0	
--	---	---	---	---------------	-----------------	--	--	---	--	---------------------------------------	--	---	-----------------	--

	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Peralatan penanganan penyelamatan non kebakaran (Rescue)	4 enis	100.000.000			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Dinas Pemasdam Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	100.000.000	
--	--	----------------------------	---	--------	-------------	--	--	--	---	--------------------------	---	---	-------------	--

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Peralatan penangan penyelamatan non kebakaran (Rescue)	2 Jenis	50.000.000			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Dinas Pemasdam Kebakaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	50.000.000	
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Taroging Kidul (Disdamkar)	Meningkatnya Jumlah Petugas Penyelamatan (Rescue) yang Berkompentensi	40 Orang	100.000.000			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Dinas Pemasdam Kebakaran	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	100.000.000	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Setiap usulan dan aspirasi dari masyarakat melalui forum Gabungan SKPD dan Musrenbang selalu diakomodir disesuaikan dengan program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang tersedia. Apabila terdapat usulan yang belum terakomodir diusulkan pada tingkat Provinsi.

Untuk hasil musrenbang, belum adanya usulan yang masuk dari masyarakat untuk Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam menjalankan tugasnya petugas pemadam kebakaran wajib siaga 24 jam yang tidak mengenal hari libur dan siap memadamkan kebakaran dan Penyelamatan dengan motto **“Pantang Pulang Sebelum Api Padam Walau Nyawa Taruhannya”**. Sosok petugas pemadam kebakaran bekerja dengan siap siaga hadir dalam penyelamatan jiwa, melakukan tugas dengan ikhlas tanpa pamrih, tanpa mengharap pujian dan sanjungan, memberi pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Memadamkan api besar dan penyelamatan tidaklah semua orang bisa melakukannya hanya petugas pemadam kebakaran yang mempunyai profesi dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan, untuk itu dituntut seorang petugas pemadam kebakaran melakukan pendidikan dan pelatihan untuk memiliki profesionalitas. Selain itu tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran dikenal dengan Panca Darma yaitu:

1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
2. Pemadaman Kebakaran;
3. Penyelamatan;
4. Pemberdayaan Masyarakat;
5. Penanganan Kebakaran Bahan Berbahaya dan Beracun.

Kebakaran adalah hal yang ditakuti yang dapat menghancurkan kebutuhan dasar masyarakat yaitu pangan, sandang, dan papan. Sumber daya disekitar masyarakat selalu ada ancaman dari kebakaran yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi, kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Untuk itu perlu mereposisi sudut pandang kita dalam penanggulangan kebakaran yang kita hadapi, serta arah kebijakan ke depan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk di dalamnya perlindungan dari ancaman serta dampak dari bencana dan kebakaran yang dapat menambah angka Kemiskinan.

Secara geografis Indonesia berada pada *ring of fire*. berada pada pertemuan tiga lempeng dunia yang menjadi faktor pemicu rawan terjadinya

bencana, disamping itu sumber kerawanan lain berupa heterogenitas bangsa Indonesia yang sewaktu-waktu dapat memicu konflik yang berdampak luas bagi keamanan dan ketenteraman rakyat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai laboratorium bencana, berbagai bencana dapat dijumpai meliputi bencana alam, non alam, maupun sosial. Bencana alam yang sering terjadi antara lain gunung meletus, tsunami, angin puting beliung, dan banjir bandang. Karakter dasar dari bencana alam ini adalah tidak dapat dilawan dan distop namun dapat dihindari dengan melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Sedangkan kebakaran dapat distop, dicegah atau di hentikan karena penyebab kebakaran 99 % akibat ulah manusia baik disengaja maupun tidak disengaja dan sebagian kecil penyebab kebakaran akibat bencana alam yang disusul timbulnya kebakaran.

Kejadian kebakaran khususnya kebakaran lahan gambut yang tidak dilakukan pemadaman dini, dapat mengakibatkan bencana pencemaran asap sampai ke negara tetangga yang mengganggu mutu udara yang berakibat terganggunya jarak pandang dan transportasi, kesehatan masyarakat pada pernapasan sehingga aktivitas kehidupan masyarakat yang berdampak terhadap kemunduruan ekonomi dan kerusakan lingkungan yang luar biasa, sehingga dibutuhkan *cost recovery* yang sangat besar. Sebagaimana yang di alami Indonesia tahun 2015 hampir seluruh provinsi dikepung pencemaran asap, mengakibatkan lebih dari sebulan kita dirundung darurat kabut asap akibat kebakaran lahan gambut yang sebagian besar terjadi di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, bahkan sebagian di Sumatera Utara, Pulau Jawa, Sulawesi Tenggara, dan Papua yang menghancurkan ratusan ribu hektar, mengakibatkan buruknya mutu udara yang berdampak terhadap terganggunya transportasi, pernapasan masyarakat, pendidikan dan terganggunya perekonomian dengan kerugian diperkirakan kurang lebih sebesar 50 triliun rupiah.

Kebijakan kebakaran dan bencana dalam urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kebakaran merupakan sub urusan bagian dari urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sub urusan kebakaran menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, Provinsi Dan Kabupaten/Kota, namun di dalam matrik pembagian kewenangan, penanggung jawab utama adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota, oleh karena itu sub urusan kebakaran menjadi strategis dan

prioritas dalam perencanaan dan anggaran pemerintah daerah sebagai perwujudan menjamin kehadiran pemerintah daerah didalam melayani penderitaan rakyat akibat bencana dan kebakaran, hal ini sebagai perwujudan yang sejalan dengan Nawa Cita atau agenda Presiden Republik Indonesia 2014-2019 pada point pertama menyatakan "menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara". Sub urusan bencana dan kebakaran dalam pasal 72 huruf e dan lampirannya undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kewenangan dan tanggungjawab daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 8 dan pasal 9 undang-undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Kedua Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah. menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran. Oleh karena itulah dituntut daerah membentuk lembaga yang membidangi sub urusan bencana dan kebakaran.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut memperhatikan tantangan perkembangan pembangunan nasional, regional maupun global, karena itu penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten. Dalam menyusun program dan kegiatan, Dinas Pemadam Kabupaten Garut tentu tidak terlepas tugas pokok dan fungsi pemdam kebakaran seperti yang telah dijelaskan di atas.

Prediksi kedepan Kondisi Kabupaten Garut sebagai kota yang mulai berkembang akan semakin padat bangunan dan gedung yang mengarah pada bangunan vertikal serta semakin padat penduduk, berdasarkan hal tersebut perlindungan kepada masyarakat, aman dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pencegahan dan penanggulangan yang handal merupakan suatu yang esensial untuk di wujudkan.

Dalam rangka mewujudkan hal dimaksud diperlukan suatu komitmen yang terintegrasi dari stakeholder, secara bertahap dan berkesinambungan dilaksanakan sebagaimana RPJMD dan RPJPD dengan menggali dan memanfaatkan peluang dari berbagai sumber anggaran.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Untuk mendukung tercapainya RPJMD Kabupaten Garut, Dinas Pemadam Kebakaran memiliki tujuan dan sasaran dalam menentukan tujuan dan sasaran kebijakan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun yang dirumuskan secara teknokrat

dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Garut. Adapun tujuan dari Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran 2023 adalah :

Peningkatan Cakupan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) dalam response time 15 menit (WMK/Kecamatan/POS Damkar).

Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran dari Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran 2022 adalah :

Meningkatnya layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 merupakan visi Bupati dan wakil Bupati Garut terpilih pada pemilihan kepala daerah serentak tanggal 27 Juni 2018, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode tahun 2019-2024, yang akan menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Garut sesuai misi yang diemban. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dokumen RPJMD harus disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJPD dalam menjabarkan visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Dan sebagaimana diatur ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih, maka RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, mengacu pula pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025.

Adapun Rekapitulasi Program dan kegiatan rancangan awal pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2023 dapat dilihat pada table 3.3.1.

**Tabel 3.3.1**  
**Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program						Tolok Ukur	Target					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							25,129,825,618					27,643,038,768				
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							13,361,589,771				14,192,663,768				
1	5	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							60,000,000				60,000,000			
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Tingkat Ketepatan Penyelesaian Perencanaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	10 Dokumen	100 Poin	30,000,000			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	30,000,000

1	5	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Meningkatnya kualitas penyajian dokumen perencanaan SKPD	Terpenuhinya Tingkat Ketepatan Penyelesaian Perencanaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	10 Dokumen	100 Poin	30,000,000			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	30,000,000
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.0 2</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>6,823,630,331</b>				<b>7,505,993,364</b>	
1	5	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terbayarnya Gaji ASN di Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	14 Bulan	100 Persen	6,823,630,331	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	7,505,993,364
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.0 5</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>358,514,780</b>				<b>369,501,278</b>	
1	5	1	2.0 5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Peralatan penunjang disiplin Pegawai	Persentase SDM aparatur yang Profesional	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	4 Unit	100 Poin	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	50,000,000

1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	tersedianya pakaian Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase SDM aparatur yang Profesional	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	208 Stell	100 Poin	308,514,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	319,501,278
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>333,700,000</b>		<b>344,750,000</b>		
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan dan Instalasi Listrik	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	9 Jenis	100 Poin	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	12,100,000
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	34 Jenis	100 Poin	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	100,000,000
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya Kebutuhan peralatan rumah tangga dinas	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	5 Jenis	100 Poin	16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	18,150,000

1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	5 Jenis	100 Poin	50,000,000		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	50,000,000
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar/Majalah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	142 Eksempel	100 Poin	13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	13,200,000
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah tamu dan peserta rapat yang mendapatkan jamuan makan minum	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	1020 OH	100 Poin	33,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	36,300,000
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	192 OH	100 Poin	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	100,000,000

1	5	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	100%	100 Poin	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	15,000,000
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>4,695,000,000</b>		<b>4,700,000,000</b>		
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang baru	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	1 Unit	100 Poin	550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	550,000,000
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya jumlah Mebeulair yang memadai	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	9 Jenis	100 Poin	135,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	135,000,000
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	4 Buah	100 Poin	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	15,000,000

1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	1 Unit	100 Poin	4,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	4,000,000,000
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>132,165,660</b>			<b>145,382,226</b>	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya penerangan, internet, dan telepon yang berfungsi dengan baik	Terpenuhi Pelayanan Administrasi Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	12 Bulan	100 Poin	94,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	104,060,000
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Pembayaran atas Jasa Perbaikan/Pemeliharaan (Service)	Terpenuhi Pelayanan Administrasi Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	2 Jenis	100 Poin	11,095,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	12,205,270
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Pembayaran Jasa Petugas Kebersihan dan Perlengkapan kebersihan	Terpenuhi Pelayanan Administrasi Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	2 Jenis	100 Poin	26,469,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	29,116,956
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>958,579,000</b>			<b>1,067,036,900</b>	

1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya kendaraan Dinas dan Operasional dengan surat-surat kendaraan lengkap	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	21 STNK	100 Poin	84,579,000		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	93,036,900
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya kendaraan Operasional dengan surat-surat kendaraan lengkap	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	2 Jenis	100 Poin	524,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	524,000,000
1	5	1	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Bangunan Gedung yang layak	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	7 Bangunan Kantor	100 Poin	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	450,000,000
1	5	4			<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>							<b>11,768,235,847</b>					<b>13,450,375,000</b>

1	5	4	2.0 1	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>10,468,235, 847</b>				<b>12,100,375, 000</b>		
1	5	4	2.0 1	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (Lanjutan)	Persentase Layanan Pencegahan, pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	1 Dokumen	69%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	100,000,000
1	5	4	2.0 1	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Kesiapan Petugas dalam Penangan Kebakara	Persentase Layanan Pencegahan, pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	115 Orang	69%	4,945,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	6,520,375,000

1	5	4	2.01	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dalam kondisi siap pakai	Persentase Layanan Pencegahan, pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	4 Jenis	69%	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	450,000,000
1	5	4	2.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Meningkatnya Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	29 Jenis	69%	4,412,860,847	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	4,420,000,000

1	5	4	2.0 1	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang Berkompetensi Sertifikat Pemadam 2	Persentase Layanan Pencegahan, pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	50 orang	69%	360,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	360,000,000
1	5	4	2.0 1	8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		Tersedianya sistem informasi penanganan kebakaran dan penyelamatan	Persentase Layanan Pencegahan, pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	1 paket	69%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	150,000,000

1	5	4	2.0 1	9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Terselenggaranya Peringatan HUT Damkar Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten	Persentase Layanan Pencegahan, pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	48%	69%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	100,000,000
1	5	4	2.0 2	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>									150,000,000	150,000,000			
1	5	4	2.0 2	1	Pendataan Sarana Proteksi Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya jumlah gedung yang terproteksi kebakaran	Terlaksananya Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	100 Unit Gedung Bangunan	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	100,000,000

1	5	4	2.0 2	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya jumlah gedung yang terproteksi kebakaran	Terlaksananya Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	50 Unit Gedung	100 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	50,000,000	
1	5	4	2.0 3	<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>													100,000,000	100,000,000
1	5	4	2.0 3	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Kualitas SDM Investigator Kebakaran	Tersedianya Investigator Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	5 Orang	5 Orang	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	100,000,000	
1	5	4	2.0 4	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>													700,000,000	700,000,000

1	5	4	2.0 4	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya kemampuan Masyarakat dalam pencegahan dini bahaya kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	800 Orang	100%	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	300,000,000
1	5	4	2.0 4	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya kemampuan Masyarakat dalam pencegahan dini bahaya kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	20 Desa	100%	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	300,000,000

1	5	4	2.0 4	3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya kemampuan Masyarakat dalam pencegahan dini bahaya kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	100 Buah	100%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	100,000,000
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2.0 5</b>		<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>							<b>350,000,000</b>		<b>400,000,000</b>			
1	5	4	2.0 5	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya penanganan penyelamatan non kebakaran (Rescue)	Persentase Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69%	6000 Orang	100%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69%	150,000,000

1	5	4	2.0 5	2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Peralatan penanganan penyelamatan non kebakaran (Rescue)	Persentase Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban		69%	4 enis	100%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69%	100,000,000
1	5	4	2.0 5	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Peralatan penanganan penyelamatan non kebakaran (Rescue)	Persentase Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69%	2 Jenis	100%	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69%	50,000,000

1	5	4	2.0 5	4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Jumlah Petugas Penyelamatan (Rescue) yang Berkompetensi	Persentase Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69%	40 Orang	100%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69%	100,000,000
<b>TOTAL</b>														<b>25,129,825,618</b>		<b>27,643,038,768</b>	

Sumber Data SIPD

**Tabel 3.3.2**  
**Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2023**

**Keterangan**

No	Jumlah	Uraian	
1	2	Program	
2	12	Kegiatan	
3	5	Kegiatan	Subagian Umum dan Renevlap
4	2	Kegiatan	Subbagian Keuangan
5	5	Kegiatan	Di Bidang
6	40	Sub Kegiatan	
7	22	Sub Kegiatan	Subbagian Umum dan PEP dan Subbagian Keuangan
8	3	Sub Kegiatan	Bidang Sarana Prasarana
9	8	Sub Kegiatan	Bidang Operasi dan Penyelamatan
10	7	Sub Kegiatan	Bidangan Pencegahan Kebakaran

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan dalam upaya pencapaian visi dan misi rencana pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah mulai tahun 2021 telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Penerapan prinsip peraturan tersebut menjadi alasan utama perubahan Renja Kabupaten Garut. Dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa datang sampai akhir periode masa jabatan kepala daerah. Hal ini berarti program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah menjadi prioritas yang akan dilaksanakan dan mendapatkan anggaran.

#### **4.2. Matriks Rencana Kerja Tahun 2023**

Matriks Rencana Kerja Tahun 2023 dapat kami sajikan pada table dibawah ini

**Tabel 4.2.1**  
**Matriks Rencana Kerja Tahun 2023**

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program						Tolok Ukur	Target				
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
1	5				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				25,129,825,618					27,643,038,768			
1	5	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				13,361,589,771					14,192,663,768			
1	5	1	2.0 1		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				60,000,000					60,000,000			
1	5	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhiya Tingkat Ketepatan Penyelesaian Perencanaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	10 Dokumen	100 Poin	30,000,000		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	30,000,000

1	5	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Meningkatnya kualitas penyajian dokumen perencanaan SKPD	Terpenuhinya Tingkat Ketepatan Penyelesaian Perencanaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	10 Dokumen	100 Poin	30,000,000		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	30,000,000
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.0 2</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>6,823,630,331</b>			<b>7,505,993,364</b>	
1	5	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terbayarnya Gaji ASN di Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	14 Bulan	100 Poin	6,823,630,331	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	7,505,993,364
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.0 5</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>358,514,780</b>			<b>369,501,278</b>	
1	5	1	2.0 5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Peralatan penunjang disiplin Pegawai	Persentase SDM aparatur yang Profesional	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	4 Unit	100 Poin	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	50,000,000

1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	tersedianya pakaian Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase SDM aparatur yang Profesional	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	208 Stell	100 Poin	308,514,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	319,501,278
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>333,700,000</b>			<b>344,750,000</b>		
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan dan Instalasi Listrik	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	9 Jenis	100 Poin	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	12,100,000
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	34 Jenis	100 Poin	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	100,000,000
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya Kebutuhan peralatan rumah tangga dinas	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	5 Jenis	100 Poin	16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	18,150,000

1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	5 Jenis	100 Poin	50,000,000		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	50,000,000
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar/Majalah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	142 Eksempl	100 Poin	13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	13,200,000
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah tamu dan peserta rapat yang mendapatkan jamuan makan minum	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	1020 OH	100 Poin	33,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	36,300,000
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	192 OH	100 Poin	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	100,000,000

1	5	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	100%	100 Poin	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	15,000,000
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>4,695,000,000</b>		<b>4,700,000,000</b>		
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang baru	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	1 Unit	100 Poin	550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	550,000,000
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya jumlah Mebeulair yang memadai	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	9 Jenis	100 Poin	135,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	135,000,000
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	4 Buah	100 Poin	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	15,000,000

1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	1 Unit	100 Poin	4,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	4,000,000,000
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>132,165,660</b>			<b>145,382,226</b>	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya penerangan, internet, dan telepon yang berfungsi dengan baik	Terpenuhiya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	12 Bulan	100 Poin	94,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	104,060,000
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Pembayaran atas Jasa Perbaikan/Pemeliharaan (Service)	Terpenuhiya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	2 Jenis	100 Poin	11,095,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	12,205,270
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Pembayaran Jasa Petugas Kebersihan dan Perlengkapan kebersihan	Terpenuhiya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	2 Jenis	100 Poin	26,469,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	29,116,956
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.0</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>958,579,00</b>			<b>1,067,036,</b>	

9										0						900		
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya kendaraan Dinas dan Operasional dengan surat-surat kendaraan lengkap	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	21 STNK	100 Poin	84,579,000			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	93,036,900
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya kendaraan Operasional dengan surat-surat kendaraan lengkap	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	2 Jenis	100 Poin	524,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	524,000,000
1	5	1	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Bangunan Gedung yang layak	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	7 Bangunan Kantor	100 Poin	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	450,000,000

1	5	4			<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>							<b>11,768,235,847</b>		<b>13,450,375,000</b>			
1	5	4	2.01		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>10,468,235,847</b>		<b>12,100,375,000</b>			
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (Lanjutan)	Persentase Layanan Pencegahan, pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	1 Dokumen	69%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	100,000,000
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Kesiapan Petugas dalam Penanganan Kebakara	Persentase Layanan Pencegahan, pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	115 Orang	69%	4,945,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	6,520,375,000

1	5	4	2.0 1	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dalam kondisi siap pakai	Persentase Layanan Pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	4 Jenis	69%	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	450,000,000
1	5	4	2.0 1	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Meningkatnya Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	29 Jenis	69%	4,412,860,847	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	4,420,000,000

1	5	4	2.0 1	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang Berkompetensi Sertifikat Pemadam 2	Persentase Layanan Pencegahan, pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	50 orang	69%	360,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	360,000,000
1	5	4	2.0 1	8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		Tersedianya sistem informasi penanganan kebakaran dan penyelamatan	Persentase Layanan Pencegahan, pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	1 paket	69%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	150,000,000

1	5	4	2.0 1	9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Terselenggaranya Peringatan HUT Damkar Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten	Persentase Layanan Pencegahan, pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	48%	69%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	100,000,000
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2.0 2</b>		<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>								<b>150,000,000</b>			<b>150,000,000</b>	
1	5	4	2.0 2	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya jumlah gedung yang terproteksi kebakaran	Terlaksananya Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	100 Unit Gedung Bangunan	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	100,000,000

1	5	4	2.0 2	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya jumlah gedung yang terproteksi kebakaran	Terlaksananya Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	50 Unit Gedung	100 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	50,000,000	
1	5	4	2.0 3	<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>													100,000,000	100,000,000
1	5	4	2.0 3	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Kualitas SDM Investigator Kebakaran	Tersedianya Investigator Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	5 Orang	5 Orang	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	100,000,000	
1	5	4	2.0 4	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>													700,000,000	700,000,000

1	5	4	2.0 4	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Dampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya kemampuan Masyarakat dalam pencegahan dini bahaya kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	800 Orang	100%	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Dampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	300,000,000
1	5	4	2.0 4	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Dampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya kemampuan Masyarakat dalam pencegahan dini bahaya kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	20 Desa	100%	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Dampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	300,000,000

1	5	4	2.0 4	3	Dukungan Pembedayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya kemampuan Masyarakat dalam pencegahan dini bahaya kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	100 Buah	100%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	100,000,000
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2.0 5</b>		<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>							<b>350,000,000</b>		<b>400,000,000</b>			
1	5	4	2.0 5	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya penanganan penyelamatan non kebakaran (Rescue)	Persentase Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69%	6000 Orang	100%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69%	150,000,000

1	5	4	2.0 5	2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Peralatan penanganan penyelamatan non kebakaran (Rescue)	Persentase Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban		69%	4 enis	100%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69%	100,000,000
1	5	4	2.0 5	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Peralatan penanganan penyelamatan non kebakaran (Rescue)	Persentase Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69%	2 Jenis	100%	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69%	50,000,000

1	5	4	2.0 5	4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Jumlah Petugas Penyelamatan (Rescue) yang Berkompetensi	Persentase Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69%	40 Orang	100%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69%	100,000,000
<b>TOTAL</b>														<b>25,129,825,618</b>		<b>27,643,038,768</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan tahun berjalan dalam RPJMD Kabupaten Garut tahun 2019-2024. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian akan menjadi fokus pencapaian target pada Renstra SKPD Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Dengan demikian Rencana Kerja tahun 2023 harus fokus terhadap target-target pada program dan kegiatan yang belum terselesaikan di tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut merupakan tanggung jawab bersama, secara struktural satu sama lain saling terkait sehingga dalam pelaksanaannya harus terpadu dan terjalin koordinasi yang baik.

Sebagaimana diketahui tugas Pemadam Kebakaran secara logis akan terus berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan. Berkenaan hal tersebut dituntut kesungguhan dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan.

Sikap terbuka, toleran dan kesediaan untuk kerjasama secara positif dan kreatif akan menambah keberhasilan program. Sehingga apa yang menjadi harapan organisasi terhadap keberhasilan program dan kegiatan dimaksud dapat mengantarkan terwujudnya visi dan misi Kabupaten Garut.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh jajaran pejabat struktural Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan rencana kerja secara sinergis dan terintegrasi.
2. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Garut tahun 2023.
3. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2023.

4. Dalam rangka menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap pejabat struktural wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkan secara berkala triwulan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut melalui Sekretaris.
5. Rencana kerja tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai akhir tahun 2023. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip - prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**